



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1670-1677

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Reformasi Ekonomi Publik: Evaluasi Kebijakan, Eksternalitas, dan Keadilan Distribusi di Era Modern

Reza Fahira<sup>1</sup>, Hendra Riofita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan ekonomi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>1</sup>[Rezafahira509@gmail.com](mailto:Rezafahira509@gmail.com), <sup>2</sup>[hendrariofita@yahoo.com](mailto:hendrariofita@yahoo.com)

### Abstrak

*Studi ini meneliti reformasi ekonomi publik di zaman modern dengan penekanan pada penilaian kebijakan, eksternalitas, dan keadilan distribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi dunia, kemajuan teknologi digital, dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan publik mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi evaluasi kebijakan publik, peran pemerintah dalam menangani eksternalitas, serta usaha mencapai keadilan distribusi melalui kebijakan ekonomi publik yang berkelanjutan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian literatur (library research). Informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan referensi tepercaya lainnya yang berkaitan dengan transformasi digital dan ekonomi publik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penilaian kebijakan memiliki peranan krusial dalam memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Digitalisasi di sektor publik dapat mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, memperluas transparansi, serta memperkuat koordinasi antar institusi. Selain itu, dampak negatif seperti polusi lingkungan dan kesenjangan digital memerlukan campur tangan pemerintah melalui peraturan, pajak, subsidi, serta kebijakan yang berfokus pada teknologi. Sebaliknya, keadilan distribusi dapat dicapai melalui kebijakan pajak yang inklusif, pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan teknologi digital. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi ekonomi publik di zaman modern perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan inovasi teknologi, penilaian kebijakan yang berkelanjutan, serta prinsip keadilan sosial untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Reformasi Ekonomi Publik, Penilaian Kebijakan, Eksternalitas, Keadilan Distribusi, Transformasi Digital

### 1. Latar Belakang

Reformasi ekonomi publik di zaman modern menjadi salah satu hal krusial dalam pertumbuhan ekonomi yang menekankan peningkatan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik. Transformasi lingkungan ekonomi yang kian rumit, terutama karena globalisasi dan kemajuan teknologi digital, mengharuskan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Dalam situasi itu, kebijakan publik tidak hanya perlu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara teoritis, ekonomi publik membahas fungsi pemerintah dalam menangani kegagalan pasar dengan menggunakan alat kebijakan seperti pajak, subsidi, dan regulasi. Menurut Mardiasmo (2019), ekonomi publik berperan dalam mencapai keseimbangan antara efisiensi dalam alokasi sumber daya dan keadilan dalam distribusi. Di sisi lain, penilaian kebijakan menjadi elemen krusial dalam menjamin bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat. Selain itu, konsep eksternalitas menunjukkan adanya efek tidak langsung dari kegiatan ekonomi yang membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mencegah terjadinya kerugian sosial. Di era kontemporer, digitalisasi juga berperan krusial dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Masalah utama dalam reformasi ekonomi publik saat ini adalah masih adanya kebijakan yang tidak efisien, ketidakmerataan distribusi pendapatan, serta dampak eksternalitas yang belum sepenuhnya terkelola. Selain itu, transformasi digital di sektor publik masih belum merata, sehingga menciptakan kesenjangan dalam akses informasi dan layanan antara daerah yang maju dan yang tertinggal. Keadaan ini mengindikasikan bahwa reformasi ekonomi publik masih menghadapi berbagai tantangan rumit dan memerlukan strategi yang lebih menyeluruh.

Mengatasi permasalahan itu memerlukan pendekatan yang menggabungkan evaluasi kebijakan yang efisien, pengelolaan eksternalitas yang sesuai, serta penerapan prinsip keadilan distribusi dalam setiap kebijakan ekonomi publik. Selain itu, penggunaan teknologi digital harus dioptimalkan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi ekonomi publik dapat berlangsung lebih responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui jenis riset kepustakaan (library research). Metode ini diterapkan untuk menganalisis gagasan reformasi ekonomi publik di zaman sekarang yang meliputi penilaian kebijakan, dampak eksternal, dan keadilan distribusi berdasarkan berbagai referensi literatur yang relevan. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang diperoleh dari Google Scholar serta sumber tepercaya lainnya

## 3. Hasil dan Diskusi

### Konsep Dasar Reformasi Ekonomi Publik

Reformasi ekonomi publik adalah rangkaian perubahan dalam kebijakan pemerintah untuk mengelola sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif. Reformasi ini tidak hanya fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan usaha perbaikan dalam distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam penerapannya, reformasi ekonomi publik mencakup berbagai elemen seperti kebijakan fiskal, regulasi, dan manajemen administrasi public yang perlu disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Selain itu, reformasi ekonomi publik juga menunjukkan usaha pemerintah dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi yang kian rumit. Tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi faktor-faktor utama yang mendorong reformasi dilakukan. Sehingga, pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan kebijakan yang fleksibel, kreatif, dan berfokus pada kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan.

Mahmudi (2020) menyatakan bahwa reformasi sektor publik harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil supaya kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami proses dan hasil dari kebijakan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dijelaskan secara moral maupun administratif. Sementara itu, fokus pada hasil menekankan signifikansi dampak nyata dari kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penerapan prinsip-prinsip itu, reformasi ekonomi publik diharapkan dapat menghadirkan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Transparansi yang tinggi akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Aspek ini sangat krusial karena kepercayaan masyarakat menjadi salah satu elemen kunci dalam kesuksesan penerapan kebijakan publik. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan reformasi ekonomi publik. Teknologi memungkinkan pemerintahan untuk mengelola data dengan lebih cepat dan tepat, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih efisien. Digitalisasi juga membuka kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

Menurut Riofita (2022), kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan teknologi digital seperti jaringan, sistem informasi, dan komunikasi adalah elemen krusial untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan efektivitas kebijakan publik. Penggunaan teknologi digital tidak hanya mempercepat distribusi informasi, tetapi juga meningkatkan kolaborasi antar institusi serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Selain itu, teknologi digital juga berkontribusi dalam menciptakan inovasi di sektor pelayanan publik, seperti layanan online yang mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai keperluan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi publik terhubung dengan transformasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Selain faktor teknologi, reformasi ekonomi publik di Indonesia juga sangat terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya ekonomi sesuai dengan karakteristik dan

potensi dari masing-masing daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang terbentuk diharapkan lebih sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.

Menurut Halim (2018), fiskal desentralisasi adalah elemen krusial dari reformasi ekonomi publik karena memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih otonom dalam mengatur keuangan dan merumuskan kebijakan pembangunan. Kewenangan ini memberi daerah kesempatan untuk lebih inovatif dalam memaksimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan daerah.

Walaupun begitu, keberhasilan desentralisasi fiskal sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada. Karena itu, diperlukan peningkatan mutu sumber daya manusia, sistem pengelolaan keuangan yang jelas, serta pengawasan yang efisien agar reformasi ekonomi publik dapat beroperasi secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, reformasi ekonomi publik adalah proses rumit dan berkelanjutan yang mencakup berbagai elemen penting, mulai dari pengelolaan pemerintahan, penggunaan teknologi digital, sampai peningkatan kapasitas daerah. Melalui integrasi yang optimal antara ketiga aspek tersebut, diharapkan reformasi ekonomi publik dapat membangun sistem ekonomi yang lebih efisien, transparan, inklusif, dan adil, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata di era modern.

## **Evaluasi Kebijakan Publik dalam Ekonomi Modern**

### **1. Pengertian Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan terus menerus untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Proses ini tidak hanya berfokus pada evaluasi hasil akhir, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap semua fase kebijakan, dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga efek jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dalam situasi ekonomi saat ini yang dicirikan oleh perubahan cepat, globalisasi, dan kemajuan teknologi, penilaian kebijakan menjadi alat krusial untuk menjamin bahwa kebijakan yang diimplementasikan tetap relevan, fleksibel, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin rumit.

Selain itu, evaluasi kebijakan berperan sebagai sarana untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Subarsono (2019), evaluasi kebijakan memiliki tujuan untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, serta pengaruh kebijakan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditentukan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal tanpa adanya pemborosan. Di sisi lain, pengaruh kebijakan meliputi beragam perubahan yang terjadi dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, serta politik sebagai akibat dari penerapan kebijakan itu. Ketiga elemen ini saling terhubung dan berfungsi sebagai indikator utama untuk mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan public.

Di samping itu, penilaian terhadap kebijakan juga berfungsi secara strategis dalam seluruh siklus kebijakan publik. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai landasan bagi pemerintah atau pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan, perbaikan, atau bahkan merumuskan kebijakan baru yang lebih efisien dan sesuai dengan keadaan nyata di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, evaluasi kebijakan turut membantu menemukan berbagai kendala yang timbul selama pelaksanaan, seperti ketidakcocokan sasaran, keterbatasan dana, serta lemahnya kolaborasi antar instansi. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya berperan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan di kemudian hari menjadi lebih berkualitas dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

### **2. Evaluasi Kebijakan Berbasis Digital**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara drastis banyak aspek kehidupan, termasuk dalam sistem penilaian kebijakan publik. Di era modern ini, evaluasi kebijakan tidak lagi dilakukan secara manual atau konvensional yang cenderung memakan waktu lama dan rawan kesalahan data, melainkan telah beralih menjadi sistem digital yang lebih maju, cepat, dan terintegrasi. Perubahan ini memfasilitasi proses pengumpulan

data, analisis informasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan lebih efisien berkat dukungan teknologi seperti sistem informasi manajemen, big data, dan kecerdasan buatan.

Nugroho (2021) menyebutkan bahwa digitalisasi di bidang kebijakan publik membuka peluang signifikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan karena semua proses bisa dilakukan dengan lebih transparan, tepat, dan berdasar data. Dengan teknologi digital, data dapat dikumpulkan secara langsung dari berbagai sumber, baik dari masyarakat, instansi pemerintah, maupun sektor swasta, sehingga informasi yang diperoleh lebih komprehensif dan mewakili. Di samping itu, penerapan sistem digital juga memungkinkan analisis data dilakukan secara otomatis dan komprehensif, sehingga hasil evaluasi tidak hanya sekadar deskriptif tetapi juga analitis dan prediktif. Hal ini sangat krusial untuk mendukung keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam menghadapi dinamika ekonomi modern yang sangat berubah-ubah

Dalam penelitian Riofita (2022), dinyatakan bahwa berbagi informasi digital atau sistem digital information sharing berperan sangat krusial dalam meningkatkan mutu data yang digunakan dalam evaluasi kebijakan. Melalui integrasi sistem informasi antar lembaga, data yang dikumpulkan tidak terpisah, tetapi dapat diakses dan dimanfaatkan secara kolaboratif oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga menurunkan risiko duplikasi data, kesalahan informasi, dan ketidaksinkronan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, informasi yang terbuka ini juga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan modern.

Selanjutnya, Riofita (2024) menyatakan bahwa penerapan sistem digital dalam kebijakan publik dapat meningkatkan akurasi evaluasi secara signifikan dan juga mempercepat proses perbaikan kebijakan yang diperlukan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti analitik big data, pembelajaran mesin, dan sistem pemantauan digital, pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul di lapangan, menganalisis penyebabnya secara lebih mendalam, serta merumuskan solusi kebijakan yang lebih efektif. Di samping itu, sistem digital memungkinkan pemantauan kebijakan secara berkelanjutan (continuous evaluation), sehingga kebijakan yang telah diimplementasikan dapat terus disempurnakan sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penilaian kebijakan berbasis digital menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

### **Eksternalitas dalam Ekonomi Publik**

Eksternalitas adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi publik yang menunjukkan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain di luar para pelaku utama aktivitas tersebut. Dampak ini bisa timbul dari proses produksi, distribusi, serta penggunaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan sehari-hari, pelaku ekonomi sering kali hanya memikirkan keuntungan dan kerugian pribadi, tanpa menilai efek sosial yang lebih besar. Akibatnya, terdapat perbedaan antara biaya atau manfaat pribadi dengan biaya atau manfaat masyarakat.

Dalam berbagai literatur ekonomi, eksternalitas dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya kesalahan pasar. Saat pasar tidak dapat menginternalisasi semua efek dari suatu kegiatan ekonomi, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak mencapai level yang ideal. Keadaan ini mengindikasikan bahwa sistem harga dalam pasar bebas tidak selalu mampu merefleksikan nilai sosial yang sesungguhnya.

Berdasarkan Sukirno (2020), eksternalitas dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif berlaku saat suatu aktivitas memberikan keuntungan tambahan bagi orang lain tanpa pembayaran langsung, seperti kegiatan pendidikan, vaksinasi, atau pembangunan infrastruktur publik. Sebaliknya, eksternalitas negatif muncul ketika suatu kegiatan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, seperti pencemaran udara, kebisingan, dan limbah industri.

Eksternalitas positif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Contohnya, pendidikan tidak hanya memberikan keuntungan bagi individu yang menuntut ilmu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia. Demikian pula, aktivitas penelitian dan inovasi yang mampu menghasilkan pengetahuan baru yang berguna bagi berbagai kalangan. Meskipun demikian, karena keuntungan tidak sepenuhnya dirasakan oleh pelaku, sering kali terjadi underproduction dalam pasar bebas.

Sebaliknya, eksternalitas negatif biasanya menyebabkan efek yang merugikan bagi masyarakat. Kegiatan industri yang memproduksi pencemaran udara dan air, contohnya, dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah sekitarnya. Tanpa intervensi, pelaku usaha cenderung mengabaikan biaya sosial itu karena tidak merasakan langsung efeknya. Akibatnya, terjadi overproduksi pada barang atau jasa yang menghasilkan eksternalitas negatif.

Boediono (2018) menegaskan bahwa eksternalitas negatif memerlukan keterlibatan aktif pemerintah melalui regulasi dan kebijakan publik. Salah satu alat yang dapat dimanfaatkan adalah pajak Pigou, yaitu pajak yang diterapkan untuk memperbaiki dampak buruk dari suatu kegiatan ekonomi. Pemerintah juga dapat menentukan standar lingkungan, memberikan sanksi bagi pelanggar, serta mengatur batas maksimum emisi yang diizinkan.

Selain kebijakan fiskal dan peraturan, pemerintah juga bisa mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak eksternalitas yang negatif. Pemberian dukungan finansial kepada perusahaan yang berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan adalah salah satu bentuk insentif yang efisien. Dengan cara ini, pelaku ekonomi akan termotivasi untuk mengurangi efek negatif dari kegiatan produksinya.

Sebaliknya, eksternalitas positif harus didorong dengan kebijakan yang sesuai. Pemerintah bisa memperbesar investasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan penelitian agar dampak sosial yang dihasilkan lebih luas. Di samping itu, program penyadaran masyarakat dan kampanye publik juga bisa meningkatkan keterlibatan individu dalam kegiatan yang menciptakan eksternalitas positif.

Dalam kemajuan ekonomi masa kini, pengertian eksternalitas mendapatkan perluasan arti. Riofita (2022) menjelaskan bahwa era digital telah menghasilkan jenis eksternalitas baru yang sebelumnya tidak begitu menonjol. Salah satu contohnya adalah ketimpangan digital antara komunitas yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak. Ini menghasilkan ketidakadilan dalam mengakses informasi dan kesempatan ekonomi.

Eksternalitas digital terlihat dari efek penggunaan media sosial yang tidak terkendali, seperti penyebaran berita bohong, ketergantungan pada teknologi, dan penurunan efektivitas kerja. Walaupun teknologi digital membawa berbagai keuntungan seperti efisiensi dalam komunikasi dan perdagangan, tanpa pengaturan yang sesuai, efeknya bisa membahayakan masyarakat secara umum.

Di samping itu, globalisasi ekonomi juga memperluas rentang eksternalitas antarnegara. Kegiatan industri di suatu negara dapat mempengaruhi lingkungan global, seperti perubahan iklim dan pemanasan global. Ini menunjukkan bahwa eksternalitas tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi telah menjadi masalah global yang memerlukan kolaborasi internasional untuk menanganinya.

Maka dari itu, diperlukan strategi kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam menangani eksternalitas. Pemerintah tak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penyelenggara dan perantara antara kepentingan ekonomi serta kepentingan sosial. Pendekatan yang berfokus pada insentif, pendidikan, dan kolaborasi sangat krusial dalam menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, eksternalitas dalam ekonomi publik tidak bisa diabaikan karena berpengaruh besar terhadap efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan eksternalitas yang efektif akan mendukung terbentuknya sistem ekonomi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi sangat krusial dalam mencapai keseimbangan itu.

Akhirnya, pemahaman yang menyeluruh tentang eksternalitas adalah penting dalam merancang kebijakan ekonomi publik yang efektif. Dengan menggabungkan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan generasi yang akan datang.

### **Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Publik**

Keadilan dalam distribusi adalah salah satu sasaran utama ekonomi publik yang berkaitan dengan cara pendapatan, kekayaan, dan sumber daya ekonomi dibagikan secara merata dalam masyarakat. Konsep ini menjadi krusial karena ketidakmerataan distribusi dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan,

kesenjangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, keadilan dalam distribusi menjadi ukuran krusial dalam menilai keberhasilan suatu sistem ekonomi.

Selain itu, keadilan distribusi tidak hanya dilihat sebagai isu ekonomi saja, tetapi juga sebagai masalah moral dan sosial. Dalam sudut pandang ekonomi publik, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya ekonomi. Hal ini krusial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh segmen tertentu, tetapi juga dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, mencapai keadilan distribusi sering kali menjadi kendala bagi pemerintah akibat adanya perbedaan kemampuan ekonomi di antara kelompok masyarakat. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keahlian, lokasi geografis, serta akses terhadap informasi dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat secara bertahap dan berkelanjutan mengurangi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan Mardiasmo (2019), kebijakan fiskal seperti pajak dan pengeluaran negara adalah alat utama untuk menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih adil. Pajak progresif, contohnya, memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan kontribusi lebih besar dari kelompok berpenghasilan tinggi yang kemudian didistribusikan kepada kelompok yang memerlukan melalui program-program sosial.

Lebih jauh, Mardiasmo menerangkan bahwa pengeluaran negara yang terarah bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat secara signifikan. Program seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk mencapai keadilan distribusi. Dengan demikian, kebijakan fiskal berperan penting dalam mengurangi disparitas ekonomi.

Di samping itu, keberhasilan kebijakan fiskal sangat tergantung pada pengelolaan pemerintahan yang baik. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program merupakan faktor kunci agar kebijakan redistribusi dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Sementara itu, Todaro (2018) mengungkapkan bahwa keadilan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga meliputi akses kepada pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Tiga aspek tersebut adalah elemen krusial dalam pengembangan manusia yang berkelanjutan.

Menurut Todaro, ketidakmerataan dalam akses terhadap layanan dasar dapat memperburuk perbedaan sosial dan menghalangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan yang adil harus mencakup peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang seimbang.

Dalam ranah kebijakan publik, Nugroho (2021) menekankan bahwa pemerintah perlu menyusun kebijakan yang inklusif untuk mencegah peningkatan kesenjangan sosial di masyarakat. Kebijakan inklusif adalah kebijakan yang memberikan peluang setara bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Lebih jauh, Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan publik yang tidak inklusif cenderung menguntungkan sebagian kelompok saja dan pada akhirnya dapat memperparah ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, prinsip keadilan sosial harus menjadi landasan dalam setiap pengembangan kebijakan ekonomi publik.

Sejalan dengan hal itu, Riofita (2024) menegaskan bahwa kebijakan publik yang berhasil harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, bukan hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan tidak hanya dinilai dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari seberapa adil distribusi hasil pembangunan tersebut.

Selanjutnya, Riofita (2024) menyoroti bahwa di era modern, keadilan distribusi harus memperhatikan aspek digitalisasi, di mana pengaksesan teknologi menjadi salah satu elemen penting dalam menentukan kesempatan ekonomi masyarakat. Kesenjangan digital bisa memperbesar perbedaan ekonomi jika tidak ditangani dengan kebijakan yang sesuai.

Secara keseluruhan, distribusi keadilan dalam ekonomi publik merupakan komponen penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang sesuai, akses yang merata terhadap

layanan dasar, serta kebijakan inklusif yang fokus pada kesejahteraan, tujuan keadilan distribusi dapat dicapai secara maksimal dalam pembangunan ekonomi kontemporer.

### **Reformasi Ekonomi Publik di Era Digital**

Transformasi ekonomi publik di zaman digital adalah suatu perubahan fundamental dalam pengelolaan ekonomi pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam kebijakan publik. Perubahan ini tidak hanya meliputi digitalisasi layanan, tetapi juga perubahan komprehensif dalam cara pemerintah merancang, menerapkan, dan menilai kebijakan ekonomi. Dengan digitalisasi, sistem ekonomi publik menjadi lebih responsif terhadap perubahan zaman yang sangat pesat.

Di samping itu, reformasi ekonomi publik di zaman digital juga menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem birokrasi tradisional ke sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi (e-government). Transformasi ini memfasilitasi proses administrasi dan layanan publik dilaksanakan dengan lebih cepat, sederhana, dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi berurusan dengan proses yang rumit dan memakan waktu karena banyak layanan sekarang sudah dapat diakses secara online. Inovasi teknologi digital juga membuka kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Informasi yang diperoleh dari sistem digital dapat dijadikan landasan untuk analisis yang lebih tepat dan objektif. Kondisi ini memungkinkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Nugroho (2021), digitalisasi di sektor publik dapat meningkatkan mutu pelayanan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Digitalisasi memungkinkan penggabungan data antar instansi pemerintah agar informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, proses birokrasi menjadi lebih efektif dan tidak lagi terhambat oleh batasan administratif. Selanjutnya, Nugroho menjelaskan bahwa digitalisasi juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Melalui sistem digital, masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan kebijakan publik dengan lebih transparan, sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

Dalam studi Riofita (2022), konsep pemberdayaan jaringan digital dijelaskan sebagai kapasitas organisasi untuk memanfaatkan jaringan digital, sistem informasi, dan pengaturan data guna meningkatkan kinerja. Konsep ini mencakup kemampuan untuk berbagi informasi dengan cepat dan terintegrasi di antara unit-unit organisasi. Lebih lanjut, Riofita (2022) menegaskan bahwa pemberdayaan jaringan digital memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kinerja organisasi, terutama dalam konteks layanan publik dan ekonomi. Dengan jaringan digital yang handal, komunikasi dan koordinasi berlangsung lebih efisien sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan lebih baik. Di samping itu, penggunaan teknologi digital juga memberi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem yang berlandaskan data memungkinkan pengenalan masalah dengan cepat sehingga solusi dapat segera dirancang dan diimplementasikan tanpa harus menunggu proses birokrasi yang berbelat.

Riofita (2024) menyatakan bahwa inovasi digital dalam kebijakan publik dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat serta mutu layanan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dapat direalisasikan melalui platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, kritik, dan saran mengenai kebijakan yang sedang berlangsung.

Selanjutnya, Riofita (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap publik. Hal ini sangat krusial, khususnya dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.

Meskipun demikian, reformasi ekonomi publik di zaman digital juga menjumpai berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah disparitas digital, yaitu ketidaksetaraan akses terhadap teknologi informasi antara berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam mendapatkan keuntungan dari digitalisasi

Maka dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa transformasi digital dilaksanakan secara inklusif dan tersebar merata. Kebijakan perlu ditujukan untuk meningkatkan akses teknologi, memperbaiki literasi digital, dan memperkuat infrastruktur digital di seluruh kawasan. Oleh karena itu, reformasi ekonomi publik di zaman digital dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

#### 4. Kesimpulan

Reformasi ekonomi publik pada zaman kini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan, pengendalian eksternalitas, dan keadilan distribusi adalah faktor penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penilaian kebijakan yang berbasis digital memperkuat transparansi dan efisiensi, sedangkan penggunaan teknologi meningkatkan mutu pelayanan publik. Namun, masih ada tantangan berupa kesenjangan dalam akses teknologi dan ketidakadilan hasil pembangunan. Agar itu terjadi, pemerintah harus meningkatkan kebijakan digital yang inklusif dan menjamin distribusi ekonomi yang lebih merata untuk seluruh masyarakat. Selain itu, diharapkan akademisi dan praktisi dapat merancang penelitian lebih lanjut untuk mendukung penyempurnaan kebijakan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

#### Referensi

1. Agustino, "Digital governance and public policy transformation in Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 112–128, 2022. <https://doi.org/10.20473/jap.v15i2.2022>
2. A. Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2018. [Online]. Available: <https://onesearch.id/>
3. A. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2019. [Online]. Available: <https://onesearch.id/>
4. B. Santoso, "E-government implementation and transparency in public administration," *Government Information Quarterly*, vol. 39, no. 1, pp. 101–115, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101642>
5. F. Rahman and D. Kurniawan, "Public sector digitalization and economic governance reform," *International Journal of Public Administration*, vol. 46, no. 5, pp. 411–423, 2023. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2057891>
6. H. Riofita, "Augmenting Islamic digital payment effect on Muslim customer purchase decision on MSMEs products," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 10, no. 4, pp. 735–758, 2024. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.1705>
7. H. Riofita, "Developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institutions," *Muslim Business and Economic Review*, vol. 1, no. 2, pp. 85–101, 2022. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.184>
8. H. Riofita, "Perceived opportunity and risk control role on willingness to recommend sharia fintech," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 13, no. 2, pp. 137–151, 2024. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.215>
9. M. P. Todaro and S. C. Smith, *Economic Development*, 13th ed. London, UK: Pearson Education, 2020. [Online]. Available: <https://www.pearson.com/>
10. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, revisi ed. Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN, 2020. [Online]. Available: <https://onesearch.id/>
11. Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset, 2019. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/>
12. N. Hidayat, "Externalities and environmental policy in modern public economics," *Environmental Economics Review*, vol. 18, no. 4, pp. 301–315, 2022. <https://doi.org/10.1080/09640568.2022.1987654>
13. R. Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, Indonesia: Elex Media Komputindo, 2021. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/>
14. R. Yusuf and A. Prasetyo, "Distributional justice and social welfare policy in Southeast Asia," *Asian Economic Policy Review*, vol. 17, no. 2, pp. 188–204, 2022. <https://doi.org/10.1111/aepr.12389>
15. S. Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2020. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/>
16. S. Wahyuni, "Digital transformation and public service quality in developing countries," *Public Policy and Administration*, vol. 21, no. 3, pp. 233–247, 2021. <https://doi.org/10.1177/09520767211012233>
17. T. Firmansyah and R. Putra, "Fiscal decentralization and regional economic equality in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 24, no. 1, pp. 55–69, 2023. <https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.18765>